

ANALISIS KEBIJAKAN *MIGRANT PROTECTION PROTOCOL* (MPP) PADA ERA DONALD TRUMP TAHUN 2019

Putu Ditha Tilottami Upaningtyas¹⁾, Penny Kurnia Putri²⁾, A.A. Ayu Intan Parameswari³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: dithatilottami@gmail.com¹, penny.tjokrodihardjo@gmail.com²,

prameswari.intan@unud.ac.id³

ABSTRACT

United States of America is a superpower country known as the nation of immigrants. Under Donald Trump's administration, immigrants, asylum seekers, and refugees were considered an existential threat to the national security. Thus, Trump issued a policy to protect his country. The focus of this research is to find out why the US implemented the Migrant Protection Protocol (MPP) Policy under Donald Trump's era in 2019. The scientific framework used in this research are Populism Perspective, Securitization Concept, and Realist Foreign Policy. The analysis that has been carried out by the author finds that the reasons for Trump's implementation of the MPP, are the illegal immigrant crisis, domestic-based crime, and eliminating jobs for local residents. As a populist actor, the arrival of immigrants, asylum seekers, and refugees are depicted as a threat to the security of the American people, which is why a firm policy is needed.

Keywords: *Asylum Seekers, MPP, Populism, Securitization.*

1. PENDAHULUAN

Amerika Serikat merupakan salah satu negara demokratis yang membuka jalur perbatasannya bagi para imigran maupun pencari suaka. Predikatnya sebagai negara adidaya yang memiliki *super power* inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi gelombang imigrasi yang masuk ke AS. Sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental hak asasi manusia (HAM), hal itu dimanifestasikan dengan memberikan hak masuk dan berbagai fasilitas penunjang bagi imigran yang mencari suaka di negaranya.

Dinamika perubahan arah kebijakan imigrasi AS mengalami perkembangan yang

turut dipengaruhi oleh pemimpin negaranya.

Ketika AS berada dibawah kepemimpinan

Presiden Ronald Reagan, George H. W. Bush, dan Barack Obama, kebijakan imigrasi AS memiliki sebuah persamaan yaitu, mereka menerapkan kebijakan imigrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental AS yakni demokrasi (*The Sacramento Bee*, 2018). Di sisi lain, Donald Trump selaku Presiden AS ke-45, memiliki perubahan kebijakan imigrasi yang cenderung bersifat kontradiktif terhadap pendahulunya.

Pada masa kampanyenya, Trump berjanji bahwa ia akan menjadi presiden yang paling sukses dalam menciptakan banyak lapangan

pekerjaan. Ia juga sangat berambisi dalam menjadikan Amerika Serikat menjadi negara yang hebat lagi atau sering kita dengar slogan “*Make America Great Again.*” dalam setiap pidatonya.

Pada tahun 2018 dibawah kepemimpinan Trump, AS dan Meksiko merundingkan sebuah kebijakan baru terkait isu imigran yaitu, kebijakan *Migrant Protection Protocol* (MPP) yang secara tidak resmi dikenal sebagai kebijakan *Remain in Mexico* (RIM). Kebijakan MPP merupakan kebijakan yang memaksa baik itu imigran maupun pencari suaka yang tiba di *Port of Entry* (POE) di perbatasan selatan AS, agar dikembalikan ke Meksiko untuk menunggu durasi proses imigrasi mereka. Dimana sebelumnya, mereka diizinkan untuk menunggu didalam wilayah AS.

Laporan *Human Rights First* (2021) telah mendokumentasikan lebih dari 1.500 kasus pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan serangan kekerasan lainnya yang dilaporkan kepada publik akibat dari penerapan kebijakan MPP. Dapat dilihat bahwa pada masa pemerintahan Trump, kebijakan yang diterapkan sangat bersifat kontradiktif terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh AS sejak dulu.

AS menunjukkan kebijakan konservatif frontal yang mengakibatkan kontroversi kemanusiaan dari dunia internasional yakni, hal-hal yang dianggap melanggar HAM. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dibuat untuk mengetahui alasan Amerika Serikat menerapkan kebijakan *Migrant Protection Protocol* (MPP) pada era Donald Trump Tahun 2019.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat penelitian sebelumnya untuk membantu penulis dalam memahami topik yang akan diteliti. Penelitian pertama adalah tulisan dari Ardianti (2015), yang berjudul “*Kebijakan Australia Dalam Menangani Imigran Ilegal Dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott Tahun 2013.*” Penelitiannya berpendapat bahwa kebijakan tersebut diperuntukkan demi menjaga kepentingan dan keamanan nasional dari ancaman eksternal, yaitu pencari suaka dan imigran ilegal yang berusaha untuk masuk ke Australia.

Penelitian Ardianti memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan imigrasi Australia. Namun, penelitian Ardianti belum membahas terkait faktor domestik yang turut memengaruhi kebijakan imigrasi suatu negara. Maka dari itu, penulis akan menggambarkan serta menonjolkan faktor domestik yang memengaruhi kebijakan imigrasi di AS yakni, fenomena domestik dan karakter ideologi pemimpin negara.

Tulisan kedua yang penulis gunakan adalah karya Amini (2018) yang berjudul “*Kebijakan Anti-Immigration Swiss Tahun 2014.*” Amini berargumen bahwa dalam pembuatan kebijakan *Anti-Immigration*, alasan utama yang mendorong Swiss mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah untuk memproteksi warga negaranya dari beberapa isu keamanan internasional yang dianggap berpotensi mengancam keseimbangan dan kesejahteraan rakyatnya.

Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana

teori sekuritisasi dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan alasan suatu negara menerapkan kebijakan untuk memproteksi dirinya dari ancaman khususnya dalam aspek imigrasi. Penulis kemudian melihat perbedaan terhadap penelitian ini, yaitu subjek yang diteliti. Penelitian Amini menggunakan Swiss sebagai subjek penelitian, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan Amerika Serikat sebagai subjek penelitian.

Tulisan ketiga yang penulis gunakan yakni karya Andani (2019) yang berjudul "*Alasan Pemerintah AS Donald Trump Menerapkan Kebijakan Kontroversial Terhadap Meksiko melalui Pembangunan Tembok dan Pembatasan Imigran Ilegal (2016-2020)*." Penelitian Andani berkontribusi dalam menunjukkan skenario terkait dengan analisis faktor domestik yang menjadi alasan dari diterapkannya kebijakan imigrasi oleh Trump.

Dapat disimpulkan bahwa tulisan Andani berfokus pada kepentingan Trump selama ia menjabat sebagai Presiden AS. Kebaruan yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah peneliti ingin menganalisis alasan diterapkannya kebijakan *Migrant Protection Protocols* (MPP) menggunakan perspektif populisme agar dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh faktor politik domestik yang lebih rinci dan komprehensif.

Tulisan terakhir yang penulis gunakan yakni, tulisan milik Michael Magcamit (2017) yang berjudul "*Explaining the Three-Way Linkage Between Populism, Securitization, and Realist Foreign Policies*." Magcamit menggunakan model hubungan tiga arah untuk menjelaskan alasan dan rasionalisasi dibalik doktrin '*America First*' yang diprakarsai

oleh Presiden Trump, serta untuk mengetahui implikasinya terhadap pembuatan kebijakan luar negeri di AS.

Magcamit dalam tulisannya berasumsi bahwa "sekuritisasi populis" merupakan sebuah saluran dimana para pemimpin yang berideologi populis dapat merumuskan, melaksanakan serta membenarkan kebijakan luar negeri realis mereka.

Penelitian Magcamit memberikan kontribusi bagi penulis terkait pemahaman karakter dan ideologi politik Donald Trump yang tergolong ke dalam populisme. Kendati demikian, penulis masih menemukan celah untuk melengkapi analisis populisme Trump tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan melengkapi celah tersebut dengan memberikan berbagai data pendukung yang mampu menonjolkan sisi populisme Trump di Amerika Serikat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif-kausalitas dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yakni, data primer dan data sekunder. Level analisis dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat selaku sebuah negara yang berdaulat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *coding*. *Coding* merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengorganisir data ke beberapa segmentasi yang bervariasi (Saldana, 2009: 78).

Teknik *coding* terbagi menjadi *first cycle coding* dan *second cycle coding*. Metode pengkodean siklus pertama mencakup hingga dua puluh lima pendekatan yang memiliki fungsi serta tujuan yang berbeda-beda (Saldana, 2009: 79). Dari dua puluh lima

pendekatan tersebut, penulis hanya akan menggunakan tiga pendekatan yang paling sesuai dengan penelitian ini, yakni *descriptive coding*, *process coding*, dan *causation coding*.

Descriptive coding dalam penelitian ini ialah “Donald Trump selaku elit politik Amerika Serikat”. *Process coding*-nya menjadi “implementasi kebijakan MPP”. *Causation coding*-nya ialah “isu imigran dan pencari suaka menyebabkan AS mengeluarkan kebijakan MPP”.

Second cycle coding dilihat dari *first cycle coding* yang memiliki persamaan. Penulis mengambil beberapa contoh dari koding siklus pertama yakni, “Donald Trump selaku elit politik AS”, “implementasi kebijakan MPP”, dan “isu imigran dan pencari suaka menyebabkan AS mengeluarkan kebijakan MPP”. Dengan demikian, koding siklus keduanya dapat berupa “alasan/penyebab diterapkannya kebijakan MPP”.

Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data dalam bentuk narasi yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan fokus pembahasan. Data yang disajikan dalam sub-bab gambaran umum diantaranya yakni, gambaran terkait isu imigrasi yang terjadi di AS, serta informasi terkait proses perumusan dan penerapan kebijakan MPP. Kemudian data yang disajikan dalam sub-bab hasil temuan dan analisis diantaranya yaitu, analisis populisme Trump, analisis upaya sekuritisasi yang dilakukan terkait isu tersebut, dan analisis *output* atau *realist foreign policy* sebagai respon atas isu yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Isu Imigrasi yang Terjadi di Amerika Serikat

4.1.1.1 Permasalahan Imigran Ilegal

Penduduk pendatang yang tidak sah atau ilegal didefinisikan sebagai semua penduduk asing yang bukan warga negara dan bukan penduduk resmi AS. Sebagian besar imigran ilegal memasuki AS tanpa pemeriksaan atau menetap melewati batas berlakunya visa yang diizinkan. *Department of Homeland Security* (DHS) memperkirakan sebanyak 11,4 juta imigran tidak sah tinggal di AS pada 1 Januari 2018.

Sebanyak 50% imigran tidak sah pada 2018 berasal dari Meksiko dengan perkiraan sebanyak 5,42 juta orang. Lima negara terkemuka berikutnya termasuk kedalam NTCA yakni, El Salvador (730.000 orang), Guatemala (620.000 orang), dan Honduras (450.000 orang). Pada 15 Oktober 2018, diperkirakan sebanyak 1.600 orang dari Honduras telah berkumpul di perbatasannya dengan Guatemala (Vox.com, 25/10/2018).

Kelompok tersebut akan melakukan perjalanan menggunakan sebuah caravan. Kemudian jumlah karavan terus meningkat menjadi sebanyak 3.000 orang yang telah tiba di perbatasan Meksiko-Guatemala pada 19 Oktober 2018 dan akan melanjutkan perjalanan ke AS (Vox.com, 25/10/2018).

Dapat dilihat bahwa permasalahan imigran yang tidak sah masih kerap terjadi di AS sejak dulu hingga sekarang. Meskipun jumlah imigran tidak sah tersebut sempat menurun, permasalahan imigran ilegal tetap terjadi setiap tahunnya dan hal tersebut merupakan sebuah ancaman bagi AS selaku negara yang berdaulat terlebih apabila mereka merupakan

orang-orang yang berusaha untuk masuk ke AS tanpa dokumen yang resmi.

Akibatnya pada pemerintahan Trump, AS berusaha untuk melakukan tindakan restriktif dalam mengatasi hal tersebut. Misalnya, pembatasan kuota masuknya pencari suaka dan pengungsi ke AS. Selain pembatasan kuota, pemerintah AS dibawah Trump juga kerap mengimplementasikan berbagai kebijakan restriktif untuk mempertahankan keamanan negara, salah satunya ialah kebijakan MPP.

4.1.1.2 Meningkatnya Tindakan Kriminalitas

Menurut laporan “*National Drug Threat Assesment*” tahun 2019 oleh *Drug Enforcement Administration* (DEA), Obat-obatan terlarang, serta organisasi kriminal transnasional maupun domestik yang memperdagangkannya, terus menjadi ancaman signifikan terhadap kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan nasional di AS.

Pada tahun 2017 kematian akibat keracunan narkoba mencapai tingkat tertinggi yang tercatat dan setiap tahun sejak 2011, melebihi jumlah kematian akibat senjata api, kecelakaan kendaraan bermotor, bunuh diri, dan pembunuhan. Sebanyak 192 orang meninggal setiap hari karena keracunan obat (DEA, 2019: 9). Melalui laporan tersebut, dikatakan bahwa fentanil menjadi pendorong utama dibalik krisis opioid yang sedang berlangsung, dimana fentanil terlibat dalam lebih banyak kematian daripada obat terlarang lainnya.

Dua negara yang menjadi sumber utama fentanil adalah Meksiko dan Tiongkok tempat

para pengedar narkoba menghasilkan fentanil dan opioid sintetik lainnya dalam operasi klandestin (DEA, 2019: 13). Para penyelundup menyelundupkan fentanil ke Amerika Serikat baik melalui darat melewati perbatasan barat daya, dan melalui udara menggunakan pos internasional dan pembawa konsinyasi ekspres.

Permasalahan tersebut tentu menjadi salah satu alasan kuat mengapa Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Trump sangat kontra terhadap masuknya kelompok imigran dan berusaha untuk memperketat pengamanan perbatasannya.

4.1.1.3 Perebutan Lapangan Pekerjaan

Permasalahan terakhir yang menjadi dampak dari kuatnya arus masuk imigrasi di AS ialah, fenomena berkurangnya lapangan pekerjaan bagi penduduk asli (*native americans*). Jesse Bennet (2020), seorang peneliti *Pew Research Center*, mengatakan bahwa imigran mulai terlibat dalam pekerjaan yang memprioritaskan keterampilan analitis, seperti sains, dan matematika, atau keterampilan dasar, seperti menulis dan berbicara.

Hasil riset yang sama mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran dimana para imigran yang masuk ke AS mulai berkembang dan menjamah lapangan pekerjaan yang memerlukan berbagai keterampilan tinggi. Imigran diharapkan memainkan peran utama dalam pertumbuhan tenaga kerja negara hingga tahun 2035.

Polemik tersebut kemudian menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah AS. Di satu sisi, pemerintah tentu saja harus melindungi dan mengutamakan kepentingan

domestik dan penduduk asli demi menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dalam permasalahan lapangan pekerjaan ini, dapat dinilai bahwa terlepas dari itu adalah pekerjaan yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi ataupun rendah, negara sebagai aktor utama akan mementingkan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan orang asing yang berada di negaranya.

4.1.2 Kebijakan *Migrant Protection Protocol (MPP)*

Kebijakan *Migrant Protection Protocol (MPP)* merupakan salah satu dari sekian banyak kebijakan imigrasi yang dikeluarkan oleh AS dibawah masa kepemimpinan Trump. MPP adalah sebuah kebijakan di mana individu asing tertentu yang memasuki atau mencari izin masuk ke AS dari Meksiko secara ilegal atau tanpa dokumentasi yang sesuai, dapat dikembalikan ke Meksiko dan menunggu di luar AS selama proses imigrasi mereka (*US Department of Homeland Security, 25/01/2019*). Kebijakan ini merupakan hasil dari sebuah diskusi dan kerja sama antara pemerintah AS dan Meksiko yang sama-sama merasakan besarnya dampak yang ditimbulkan akibat derasnya arus masuk imigrasi di perbatasan.

Sebuah Memorandum tentang *Policy Guidance for Implementation of the Migrant Protection Protocols* menunjukkan bahwa perumusan dari kebijakan MPP muncul akibat berbagai fenomena dan polemik tertentu yang terjadi akibat kuatnya arus masuk imigrasi di perbatasan antara AS dengan Meksiko diantaranya yakni, imigran dan pencari suaka yang kerap datang ke wilayah tersebut tanpa dokumentasi yang resmi, terjadi berbagai

tindakan kriminal seperti *smuggling* dan *trafficking* serta permasalahan lainnya yang tentu saja berpotensi untuk mengganggu kestabilan dan keamanan kedua negara ini (*US Department of Homeland Security, 25/01/2019*).

Sebelum MPP diterapkan, para imigran serta pencari suaka diizinkan untuk menunggu di Amerika Serikat selama kasus suaka mereka dipersidangkan. Namun pasca diterapkannya MPP, kelompok tersebut kini terpaksa menunggu di kota-kota perbatasan Meksiko. Mayoritas pencari suaka yang kembali ke Meksiko dibawah MPP berasal dari *Northern Triangle of Central America (NTCA)* yang terdiri dari El Salvador, Guatemala dan Honduras.

Menurut laporan *The Strauss Center* yang berjudul "*Migrant Protection Protocols: Implementation and Consequences for Asylum Seekers in Mexico*" (2020) oleh Leutert, sejak MPP pertama kali diterapkan pada Januari 2019, lebih dari 64.000 orang telah diproses ke dalam program tersebut dan dikembalikan ke Meksiko. Sesuai dengan data dalam tabel diatas, per 31 Desember 2019, INM mengatakan bahwa sebagian besar imigran pencari suaka telah dipulangkan ke Ciudad Juárez (18.728 orang), disusul Matamoros (17.121 orang), Nuevo Laredo (11.225 orang), Tijuana (7.223 orang), Mexicali (6.739 orang) dan Piedras Negras (1.108 orang). MPP baru dimulai di Nogales pada tahun 2020 sehingga daerah tersebut tidak termasuk kedalam data INM.

4.2 Hasil Temuan dan Analisis

4.2.1 Analisis Populisme Donald Trump

4.2.1.1 Biografi Singkat dan Populisme dalam Karir Politik Donald Trump

Donald John Trump atau kerap dikenal dengan Donald Trump lahir di Queens, New York, pada 14 Juni 1946. Pasca menyelesaikan jenjang pendidikannya, Trump mengikuti jejak ayahnya berkarir di bidang *real estate*, guna memenuhi ambisinya untuk mengembangkan bisnis keluarganya yaitu, *The Trump Organization* (Infobiografi.com, 20/10/2021).

Selain memiliki passion sebagai seorang *entrepreneur*, Trump juga berkeinginan untuk memasuki arena politik. Pada tahun 2015, Trump mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam pencalonan presiden AS periode 2016. Ia secara resmi mengumumkan pencalonannya pada Juni 2015. Semenjak itu Trump mulai aktif berkampanye untuk mendapatkan simpatisme dari masyarakat AS. Dalam kampanye tersebut Trump memilih tema besar yakni "*Make America Great Again*".

Tema ini seakan menjadi cerminan dari Trump dalam memimpin AS kedepan yang mengacu pada ideologi politik yang mendasari jati diri sekaligus identitas politik Trump yakni, populisme. Trump berusaha untuk menunjukkan bahwa ia berpihak sepenuhnya kepada rakyat (*the people*) dengan memberikan janji-janji dimana ia akan memfokuskan pemerintahannya untuk melayani rakyat dan negara.

4.2.1.2 Pembingkaiian Politik: Imigran dan Pencari Suaka Sebagai Sumber Ancaman Keamanan Domestik Amerika Serikat

Telah menjadi sebuah rahasia publik bahwasannya Trump merupakan seseorang yang terkenal dengan sikap anti-imigrannya. Sisi tersebut telah ditunjukkan secara terbuka kepada publik oleh Trump sejak masa kampanye kepresidenannya tahun 2016. Kelompok yang menjadi sasaran utama kebencian Trump ialah kelompok imigran, pencari suaka, serta pengungsi, terutama mereka yang dianggap memasuki AS secara ilegal.

Dalam pidato kampanyenya pada tahun 2016 silam, Trump menuduh imigran yang berasal dari Meksiko sebagai kelompok kriminal atau penjahat. Pernyataan tersebut dikutip melalui *The Washington Post* (11/01/2018):

"When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending 'you'. They're not sending 'you'. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people."

Pada saat yang bersamaan, Trump juga mengatakan:

"What can be simpler or more accurately stated? The Mexican Government is forcing their most unwanted people into the United States. They are, in many cases, criminals, drug dealers, rapists, etc."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Trump menganggap kelompok tersebut menjadi sumber kejahatan dan kriminalitas seperti penyebaran narkoba, dan tindakan kriminal lainnya. Kalimat "*They're not sending 'you'*" ditujukan untuk masyarakat AS. Tujuannya adalah untuk memuji audiens

bahwa mereka adalah orang-orang terbaik dan mereka tidak seperti orang-orang yang dikirim oleh Meksiko ke AS. Hal ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa Trump membeda-bedakan struktur masyarakatnya dimana ia menganggap bahwa masyarakat AS merupakan 'kelompok yang berperilaku baik' sedangkan para imigran, pencari suaka, serta pengungsi dari Meksiko merupakan 'kelompok yang berperilaku buruk'.

Selain menunjukkan kebenciannya terhadap kelompok imigran, pencari suaka dan pengungsi dari Meksiko, pada tanggal 15 Januari 2016, melalui akun twitternya, Trump mengunggah:

"More radical Islam attacks today - it never ends! Strengthen the borders, we must be vigilant and smart. No more being politically correct."

Pernyataan tersebut mengindikasikan populisme Trump dengan menyudutkan kelompok Islam sebagai sumber dari serangan radikal yang telah terjadi. Atau dengan kata lain, Trump tidak segan-segan menunjukkan kebenciannya terhadap kelompok masyarakat yang dianggap asing atau 'berbeda' dari masyarakat Amerika Serikat.

Lebih lanjut, kebencian tersebut turut dipertegas melalui tweet nya pada 13 Juni 2016, dimana Trump mengunggah:

"In my speech on protecting America, I spoke about a temporary ban, which includes suspending immigration from nations tied to Islamic terror." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Trump akan melakukan segala hal yang diperlukan untuk menyalurkan populismenya, serta

penolakannya terhadap pluralisme di AS. Dimana ia berjanji akan memberlakukan pelarangan imigrasi terhadap imigran yang datang dari negara-negara Islam yang menjadi tempat asal dari pelaku terorisme.

Kedua pernyataan tersebut pada dasarnya sangat sesuai dengan asumsi dari perspektif populisme, dimana Jan-Werner Muller dalam bukunya yang berjudul *"What is Populism?"* mengatakan bahwa disamping mengadopsi gerakan anti-elitis, populisme juga cenderung bersifat anti-pluralis atau menolak keberadaan pluralisme dalam tatanan sosial tertentu (Muller, 2016: 3). Dalam konteks ini, Trump menganggap kelompok imigran, pencari suaka, serta pengungsi sebagai sebuah kelompok asing dan 'berbeda' dari kelompok yang ia anggap sebagai warga negara AS dimana mereka menjadi sumber dari permasalahan yang terjadi.

4.2.2 Analisis Tindakan Sekuritisasi yang Dilakukan oleh Donald Trump Terkait Isu Imigrasi

Konsep sekuritisasi pertama kali diperkenalkan oleh *Copenhagen School* melalui pakar akademisi seperti Barry Buzan dan Ole Weaver yang berpendapat bahwa masalah keamanan sejatinya tidak muncul begitu saja, tetapi dibangun sedemikian rupa dengan melakukan upaya sekuritisasi oleh aktor tertentu melalui tindak tutur (*speech act*).

Terdapat beberapa elemen utama dalam proses sekuritisasi diantaranya yaitu, *referent objects* (objek keamanan), *speech act* (tindak tutur), *securitizing actors* (aktor sekuritisasi), *functional actors* (aktor fungsional) serta

existential threats (ancaman eksistensial) (Hadiwinata, 2017).

4.2.2.1 *Speech Act*

Dalam Konsep Sekuritisasi yang dipopulerkan oleh Mazhab *Copenhagen School*, tindak tutur merupakan sebuah komponen yang sangat penting untuk menentukan arah sekuritisasi terhadap suatu isu. *Speech act* dapat berupa usaha untuk membingkai (*framing*) suatu permasalahan atau isu. *Framing* memberikan definisi dan interpretasi khusus tentang isu-isu politik terhadap publik (Hadiwinata, 2017: 14).

Dikutip dari laman thetrumparchive.com, pada 9 Pebruari 2016, Trump dalam akun twitternya membagi unggahan pernyataan: “*We will stop heroin and other drugs from coming into New Hampshire from our open southern border. We will build a wall and have security.*” Melalui kalimat tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa Trump berusaha untuk mem-*framing* isu imigrasi yang terjadi di perbatasan selatan AS sebagai sebuah ancaman bagi keamanan nasional.

Ia menegaskan bahwa imigran ilegal yang masuk melalui perbatasannya dengan Meksiko menjadi sumber dari meningkatnya penyebaran obat-obatan terlarang dan narkoba lainnya ke Amerika Serikat. Trump juga mengatakan bahwa ketika terpilih menjadi presiden nantinya, ia akan membangun tembok besar di perbatasan tersebut demi menciptakan dan menjaga keamanan perbatasan.

Pernyataan lainnya disampaikan melalui pidato imigrasinya pada rapat umum di Phoenix pada 31 Agustus 2016 yang dikutip melalui laman *Lost Angeles Times*

(31/08/2019) mengatakan: “*A 2011 report from the Government Accountability Office found that illegal immigrants and other non-citizens, in our prisons and jails together, had around 25,000 homicide arrests to their names, 25,000.*” Dalam pernyataan tersebut, Trump secara halus mengatakan bahwa imigran ilegal merupakan isu yang sangat penting karena menjadi sumber dari tindakan kejahatan pembunuhan yang terjadi di AS.

Dalam kesempatan yang sama, Trump menambahkan:

“*While there are many illegal immigrants in our country who are good people, many, many, this doesn't change the fact that most illegal immigrants are lower skilled workers with less education, who compete directly against vulnerable American workers, and that these illegal workers draw much more out from the system than they can ever possibly pay back. And they're hurting a lot of our people that cannot get jobs under any circumstances.*”

Melalui pernyataan tersebut, Trump berusaha menciptakan narasi dan membingkai kelompok imigrasi yang masuk ke AS bersifat mengancam masyarakatnya dalam segi aspek kesejahteraan. Dimana selain berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, para imigran ilegal yang dinilai berpendidikan lebih rendah, dianggap menciptakan persaingan lapangan pekerjaan dengan masyarakat AS yang berada dalam posisi rentan.

Pada tahun 2018, AS mengalami krisis imigrasi di perbatasan selatan akibat gelombang besar masuknya pencari suaka yang datang dari *Central America* menggunakan *caravans* atau rumah yang

didesain menyerupai mobil dan memiliki roda. Menanggapi hal tersebut, Trump menyampaikan pidatonya di Gedung Putih, yang dilansir melalui laman *American Public Broadcast Service* (01/11/2018), mengatakan “*This is an invasion.*” Kemudian ia menambahkan, “*We’re not releasing them into our country anymore.*”

Pemilihan diksi dalam pidato yang disampaikan Trump, mengindikasikan bahwa situasi tersebut dianggap memiliki urgensi yang sangat tinggi sehingga hal itu menjadi suatu ancaman bagi keamanan nasional. Selain itu, Trump juga turut memanfaatkan celah yang ada dengan cara membangun wacana sekritisasi dalam rangka menyalurkan karakter populismenya yaitu, sikap anti-imigran dan anti-pluralisnya. Lebih lanjut, Trump kemudian mengumumkan rencananya untuk menandatangani perintah imigrasi (kebijakan MPP) sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan Trump diatas, usaha *framing* terhadap isu imigrasi yang terjadi di AS pada akhirnya mampu menciptakan narasi bahwa imigran, pencari suaka dan pengungsi dianggap sebagai sebuah ancaman yang nyata. Dimana mereka dianggap menyebabkan permasalahan-permasalahan diantaranya yakni, meningkatnya imigran ilegal yang masuk ke AS, meningkatkan tindakan kriminalitas, dan terjadinya persaingan perebutan lapangan pekerjaan antara orang asing dan penduduk asli AS.

Hal tersebut memberikan justifikasi dan kemudahan bagi Trump untuk merealisasikan berbagai usulan kebijakan terkait keamanan nasional. Diantaranya, pembangunan tembok

besar yang memperkuat pertahanan di perbatasan antara AS dan Meksiko, mendeportasi imigran ilegal yang masuk melalui perbatasan selatan AS, mengimplementasikan kebijakan *Travel Ban*, *Zero Tolerance*, serta kebijakan *Migrant Protection Protocol* (MPP).

4.2.2.2 Referent Object, Securitizing Actor, Functional Actor, dan Existential Threat

Dalam penelitian ini objek keamanan yang digunakan ialah AS selaku sebuah negara yang berdaulat. Pada penelitian ini, *securitizing actor* yang dimaksud ialah Donald Trump sejak beliau maju sebagai calon presiden dari Partai Republik hingga secara resmi menjabat sebagai Presiden AS ke-45. Aktor fungsional (*functional actors*) ialah aktor yang turut serta memengaruhi proses penyampaian pidato (*speech act*) yang diterima oleh audiens, tetapi aktor ini bukanlah objek keamanan maupun aktor sekritisasi. Dalam konteks penelitian ini audiens yang dimaksud ialah masyarakat AS dan aktor fungsional yang dimaksud merupakan para pendukung Trump baik itu mereka yang berasal dari anggota Partai Republik maupun simpatisan.

Menurut tulisan milik Hadiwinata dalam bukunya yang berjudul “*Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif & Reflektif*” (2017), proses sekritisasi mencakup logika retorika tertentu yang terdiri dari tiga hal. Pertama, adanya sebuah klaim bahwa suatu objek tertentu dikatakan sedang menghadapi ancaman eksistensial. Kedua, adanya permintaan untuk

melakukan tindakan diluar kebiasaan sebagai respon untuk menghadapi ancaman tersebut yang sekaligus akan menjustifikasi tindakan-tindakan darurat yang dilakukan. Ketiga, adanya upaya untuk meyakinkan publik bahwa tindakan luar biasa yang dilakukan di luar prosedur normal tersebut dapat dibenarkan atas dasar untuk menghadapi ancaman eksistensial yang ada.

Dalam konteks penelitian ini, Trump selaku pemimpin negara berperan sebagai aktor sekuritisasi yang mengklaim dan membangun konstruksi kepada audiens melalui tindakan *speech act* berupa pidato bahwa, AS selaku *referent object* diklaim sedang menghadapi ancaman eksistensial yang meliputi datangnya gelombang besar imigran, pencari suaka, dan pengungsi yang ingin masuk ke AS secara ilegal melalui perbatasannya dengan Meksiko, meningkatnya tindakan kriminalitas, dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Kemudian, publik selaku audiens menyepakati klaim dan konstruksi yang dibangun oleh Trump.

Proses tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah produk berupa kebijakan-kebijakan imigrasi, baik itu kebijakan domestik maupun luar negeri yang disebut dengan tindakan diluar kebiasaan sebagai respon untuk menghadapi ancaman yang ada. Aktor sekuritisasi akan berusaha untuk meyakinkan publik dengan upaya *framing*-nya bahwa tindakan luar biasa yang dilakukan di luar prosedur normal tersebut dapat dibenarkan atas dasar untuk menghadapi urgensi dari ancaman eksistensial yang dianggap sebagai sebuah prioritas utama dan harus segera diatasi dengan cepat (Hadiwinata, 2017: 27).

4.2.3 Analisis *Realist Foreign Policy*

Mengutip Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, dalam tulisan yang berjudul "*Security: A New Framework for Analysis*" (1998), dikatakan bahwa Mazhab *Copenhagen School* telah menambahkan formasi diskursif kedalam konteks sejarah perkembangan keamanan. Mazhab ini menggambarkan bagaimana suatu negara mampu mengonstruksi wacana, dan pada akhirnya hal tersebut berdampak besar pada perumusan kebijakan luar negeri.

Dalam konteks ini, AS dibawah masa pemerintahan Trump yang populis, mengonstruksikan wacana yang mengklaim bahwa krisis imigrasi yang terjadi di AS merupakan sebuah ancaman eksistensial yang nyata bagi keamanan negara. Maka dari itu, diperlukan sebuah upaya sekuritisasi untuk merespon ancaman yang ada, dimana pada akhirnya pemerintahan Trump mengeluarkan Kebijakan *Migrant Protection Protocol* (MPP).

Haviland Smith, melalui tulisannya yang berjudul "*Idealist vs. Realist Foreign Policy*" (2011), mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat dua pendekatan yang berbeda untuk kebijakan luar negeri. Pertama, kebijakan luar negeri yang bersifat "realis", menempatkan kepentingan dan keamanan nasional diatas ideologi, etika, dan moralitas suatu negara. Kedua, Aliran kebijakan luar negeri yang "idealis", berpendapat bahwa kebijakan luar negeri harus mencerminkan nilai-nilai etika, moral dan filosofis suatu negara.

Dalam konteks ini, AS dibawah kepemimpinan Trump menerapkan kebijakan luar negeri imigrasi yang realis. Dimana

Trump selalu menegaskan bahwa keamanan nasional merupakan sebuah prioritas utama, terlepas dari ideologi dan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh AS. Maka dari itu, Trump selalu menerapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat agresif terhadap kelompok imigran, pencari suaka, dan pengungsi. Salah satunya ialah Kebijakan *Migrant Protection Protocol (MPP)*.

Seperti yang sudah penulis paparkan pada bagian gambaran umum, dapat dilihat bahwasanya AS dibawah era Trump berada ditengah-tengah konstruksi yang menganggap bahwa kelompok pendatang yakni, imigran, pencari suaka dan pengungsi merupakan sebuah ancaman bagi keamanan nasional dan kestabilan domestik AS. Dapat ditarik pemahaman bahwa konstruksi tersebut tidak semata-mata dibuat tanpa alasan. Konstruksi itu, didukung dengan fakta lapangan bahwa kelompok-kelompok pendatang tersebut pada akhirnya berpotensi memberikan ancaman eksistensial bagi keamanan nasional AS.

Dapat dinilai bahwasanya kebijakan MPP ini diimplementasikan dengan tujuan untuk menjaga keamanan nasional AS di perbatasannya dengan Meksiko. Dimana AS melihat bahwa untuk menjaga keamanan domestik masyarakatnya, perlu dilakukan sebuah pengamanan yang ketat di pintu masuk perbatasan selatan AS yakni yang berbatasan langsung dengan Meksiko. Kebijakan ini ditujukan untuk menyaring serta membatasi masuknya imigran dan pencari suaka ke AS agar kedepannya mampu mengurangi permasalahan-permasalahan domestik yang muncul akibat kuatnya arus masuk para pendatang.

Sesuai dengan pemaparan dan analisis diatas terkait dengan Kebijakan *Migrant Protection Protocol (MPP)*, pada akhirnya kebijakan tersebut dapat digolongkan sebagai sebuah kebijakan luar negeri yang realistis (*realist foreign policy*). Hal tersebut sesuai dengan asumsi Haviland Smith, melalui tulisannya yang berjudul "*Idealist vs. Realist Foreign Policy*" (2011), dimana ia mengatakan bahwa kebijakan luar negeri yang realistis menempatkan kepentingan dan keamanan nasional diatas ideologi, etika, dan moralitas suatu negara.

Dalam konteks ini, Trump selaku Presiden AS menempatkan keamanan nasionalnya diatas ideologi dan nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh AS selaku negara yang demokratis, dengan menerapkan kebijakan MPP yang cenderung bersifat agresif dan acapkali memberikan dampak negatif terhadap imigran dan pencari suaka yang ingin masuk ke AS.

Alasan utama AS menerapkan kebijakan ini ialah karena para imigran, pencari suaka dan pengungsi dianggap sebagai sebuah ancaman eksistensial yang menyebabkan maraknya fenomena imigran ilegal, meningkatnya tindakan kriminalitas, dan terjadinya persaingan lapangan pekerjaan yang cukup ketat antara penduduk asli AS dengan orang asing atau para pendatang tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pada apa yang telah peneliti paparkan di atas, dapat dilihat bahwasanya Donald Trump selaku pemimpin negara yang populis dapat dengan mudah memanfaatkan

ideologinya untuk melakukan upaya sekuritisasi terkait isu imigrasi yang terjadi di AS. Selaku aktor yang teridentifikasi populis, Trump menyalurkan populismenya dengan melakukan upaya sekuritisasi terhadap isu imigrasi yang dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi AS dibawah kepemimpinannya dengan menerapkan kebijakan yang bersifat realis.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan menggunakan kerangka keilmuan yang terdiri dari Perspektif Populisme, Konsep Sekuritisasi dan *Realist Foreign Policy*, ditemukan hasil bahwa alasan Donald Trump menerapkan Kebijakan *Migrant Protection Protocol* (MPP) ialah karena terjadi krisis imigran ilegal, meningkatnya kriminalitas domestik, serta mengeliminasi lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal. Sebagai aktor yang teridentifikasi populis, maka kehadiran imigran, pencari suaka dan pengungsi kemudian diproyeksikan sebagai pihak yang mengancam keamanan rakyat AS, sehingga perlu diberi kebijakan tegas.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Buzan, B. (1991). *New Patterns of Global Security in the twentieth century*. *International Affairs*, 67(3).
- Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap De Wilde. 1998. "Introduction. Security Analysis: Conceptual Apparatus. - Security: A New Framework for Analysis." 239.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ullman, R. H. (1983). *Redefining security*. *International security*, 8(1), 129-153

Jurnal:

- Amini, N. A. (2016). *KEBIJAKAN ANTI-IMMIGRATION SWISS TAHUN 2014*.
- Ardianti, A. (2015). *Kebijakan Australia dalam Menangani Imigran Ilegal Dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott Tahun 2013* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Magcamit, Michael. 2018. "Explaining The Three-Way Linkage Between Populism, Securitization, And Realist Foreign Policies: President Donald Trump and the Pursuit of 'America First' Doctrine." <https://doi.org/10.1177/0043820017746263> 180(3): 6–35. (October 31, 2021).

Skripsi:

- Tiya, Andani (2019). "ALASAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT DONALD TRUMP MENERAPKAN KEBIJAKAN KONTROVERSIAL TERHADAP MEKSIKO MELALUI PEMBANGUNAN TEMBOK DAN PEMBATASAN IMIGRAN ILEGAL (2016 - 2020)"

Laman Resmi Pemerintah:

- DHS. 2019. *U.S. Border Patrol Southwest Border Apprehensions by Sector Fiscal Year 2019 | U.S. Customs and Border Protection*. <https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-migration/usbp-sw-border-apprehensions-fy2019> (October 30, 2021).
- Garunay, Melanie. 2015. "President Obama: 'Immigrants and Refugees Revitalize and Renew America' | The White House." <https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/immigration/economy> (October 28, 2021).
- The White House. 2019. "Immigration | The White House." <https://trumpwhitehouse.archives.gov/issues/immigration/> (October 29, 2021).
- UNHCR "Viewpoint: 'Refugee' or 'Migrant' – Which is right?"

<https://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html>. (January 12, 2022).
The Trump Archive.com
<https://www.thetrumparchive.com/> (March 5, 2022).

Laman Berita:

Washington Post.com Editors (2017). "How Donald Trump came up with 'Make America Great Again'".
https://www.washingtonpost.com/politics/how-donald-trump-came-up-with-make-america-great-again/2017/01/17/fb6acf5e-dbf7-11e6-ad42-f3375f271c9c_story.html
(February 19, 2022).

Washington Post.com Editors (2019). "Trump's 'Migrant Protection Protocols' hurt the people they're supposed to help"
<https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/07/18/trumps-migrant-protection-protocols-hurt-people-theyre-supposed-help/>
(February 20, 2022).

Washington Post.com Editors. (2019). "Opinion: Yes, undocumented immigrants take jobs from Americans. Here's the proof."
<https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/08/16/yes-undocumented-immigrants-take-jobs-americans-heres-proof/>
(March 1, 2022).

Laman Artikel:

Biography.com Editors. (2021). "Donald Trump Biography".
<https://www.biography.com/us-president/donald-trump>
(February 10, 2022)

Smith, Haviland. (2011). "Idealist vs. Realist Foreign Policy".
<https://americandiplomacy.web.unc.edu/2011/04/idealist-vs-realist-foreign-policy/>. (February 13, 2022)

Laporan:

Baker, Bennet. (2021). Estimates of the unauthorized immigrant

population residing in the United States: January 2015–January 2018. Population Estimates.

Drug Enforcement Administration. (2019). National drug threat assessment. Drug Enforcement Administration Strategic Intelligence Section, US Department of Justice. Published December, 2020-01.

HRF. 2021. "Delivered to Danger | Human Rights First."
<https://www.humanrightsfirst.org/campaign/remain-mexico>
(October 30, 2021).

Leutert, Stephanie. 2020. "Migrant Protection Protocols: Implementation and Consequences for Asylum Seekers in Mexico (2019-20) - The Strauss Center.": 1–75.
<https://www.strausscenter.org/publications/migrant-protection-protocols-implementation-and-consequences-for-asylum-seekers-in-mexico-2019-20/>
(November 6, 2021).

Pew Research Center. (2019). "Measuring illegal immigration: How Pew Research Center counts unauthorized immigrants in the U.S."
<https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/12/how-pew-research-center-counts-unauthorized-immigrants-in-us/>
(February 27, 2022).

United States. Office of Immigration Statistics. (2008). Yearbook of Immigration Statistics. US Department of Homeland Security, Office of Immigration Statistics.

United States Department of Homeland Security. (2010). Yearbook of immigration statistics: 2009.

US Department of Homeland Security. (2016). 2014 yearbook of immigration statistics.